

DAFTAR PUSTAKA

- Cici Ariyanti, Dida Rahmadanik, & M. Kendry Widiyanto. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas Di Kecamatan Gondang. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 50–61.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1299>
- Dela Pusfita, Kustiawan Kustiawan, & Eki Darmawan. (2024). Peran Pemerintah Desa terhadap Penanganan Stunting di Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2023. *Jurnal Media Administrasi*, 9(2), 13–24.
<https://doi.org/10.56444/jma.v9i2.1966>
- Haria, D., Sembiring, K., Sebayang, J., Rohana Simbolon, B., Dartianis Haria, O., & Darma Agung, U. (2023). *PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DESA DI DESA BERTAH KECAMATAN TIGA PANA KABUPATEN KARO*.
- Haskas, Y., Nani, S., & Makassar, H. (2020). GAMBARAN STUNTING DI INDONESIA: LITERATUR REVIEW. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* (Vol. 15).
- Isra Hayati. (2021). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN*.
- Mingus Carlos Zondha. (2023). *SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENURUNKAN STUNTING*.
- Nur Hasrat Illahi. (n.d.). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA KONTUMERE KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI*.
- Narwoko, J. , D. (2019). *Sosiologi : teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana.
- Purnamasari, H. (2021). *Collaborative governance dalam penanganan stunting*.
<https://doi.org/10.29264/jkin.v18i3.9665>
- Ridwan Telaumbanua. (2024). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN SAWO KABUPATEN NIAS UTARA*.
- Selpi Sukaesi. (2024). *PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN STUNTING DI DESA LAIYAKECAMATAN CENRANAKABUPATEN MAROS*.
- Tri Nur Azizah. (n.d.). *PERAN DESA DALAM MENEKAN STUNTING SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SDGs DESA SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO*.
- Yiyin Antias Wahyuningsih, I. U. C. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Niara*, 18, 1.
- Soekanto. (2002). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.

